

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdoellah, Awan Y., dan Yudi Rusfiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Igirisa, Irawaty. *Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022.

Kendi, Ibrahim Kristofol. *Implementasi Kebijakan Publik: Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2024.

Luthfie, Muhammad. *Kebijakan Publik: Ruang Lingkup & Implementasi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.

Meutia, Intan Fitri. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2017.

Naili, Yuris Tri, dan Maya Ruhtiani. *Hukum Kesehatan*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2022.

Salim, Ishak, dan M. Joni Yulianto. *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*. Jakarta: BAPPENAS, KSP, dan JPODI, 2021.

Smith, Rhona K. M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Diedit oleh Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

C. Jurnal/Artikel

Ahmad Kolyubi, Suwaib Amiruddin, dan Riswanda."Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang."

Aniyati, Dewi Rara, R. Enkeu Agiati, dan Sakroni."Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik terhadap Pekerjaan di Desa Cimerang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 2023.

Jayanuarto, Rangga, Sinung Mufti Hangabei, dan Mikho Ardinata. 2021. "Pembadanan Prinsip dan Asas Hukum Pada Lembaga Adat Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Litigasi." *University of Bengkulu Law Journal Vol. 6 No. 2*.

Hanjarwati, Astri, Jamil Suprihatiningrum, dan Siti Aminah."Survei Aksesibilitas Fisik dan Sosial sebagai Dasar Penyusunan Grand Design Desa Inklusif." *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)* 8, no. 1 (2021).

Larasati, Eufrasia Nadia, dan Maria Madalina."Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait Penyelenggaraan Desa Inklusi dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas." *Res Publica* 4, no. 1 (2020).

Putra, Lalu Bintang Wahyu.”Mewujudkan Kota Inklusi: Inklusivitas dan Aksesibilitas Ruang Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta.” *Jurnal Pembangunan Masyarakat Desa*, 2024.

Zulkenedi, Yuliandri, Adinil Zetra, dan Indah Adi Putri.”Kebijakan Publik dan Penyandang Disabilitas di Indonesia: Tantangan dan Alternatif Kebijakan.” *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2023.

Ambarwati, Okki Chandra, Amalina Niara Putri, dan Riant Nugroho. 2022. “Studi Deskriptif Riset Kebijakan Tentang Hak-Hak Difabel di Indonesia.” *Matra Pembaruan* 6(1).

Ma’ruf, Muhammad Farid, Galih Wahyu Pradana, Deby Febriyan Eprilianto, Suci Megawati, dan Meki Wastiti. 2022. “Mengurai Kesenjangan Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi: Studi Kasus Kabupaten Ponorogo.” *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP)* 8(1).

Salsabiila, Marsaa, dan Imam Yuadi. 2023. “Analisis Bibliometrik Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas.” *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 4(3).

Muhaimin, Andin Akhmad, dan Muhammad Riyandi Firdaus. 2022. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin.” *Jejaring Administrasi Publik* 14(1).

D. Sumber Wawancara

Masyarakat Desa Tanjung Agung. Wawancara. Desa Tanjung Agung, 15 Juni 2026.

Orang Tua selaku Perwakilan Anak Penyandang Disabilitas Desa Tanjung Agung. Wawancara. Desa Tanjung Agung, 15 Juni 2026.

Sekretaris Desa selaku Perwakilan Kepala Desa Tanjung Agung. Wawancara. Desa Tanjung Agung, 15 Juni 2026.

Sekretaris Desa selaku Perwakilan Perangkat Desa Tanjung Agung.
Wawancara. Desa Tanjung Agung, 15 Juni 2026.

E. Sumber Lain

Aparat Pemerintah Desa Tanjung Agung. Observasi mengenai bentuk bantuan sosial dan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, 2026.

Data Penyandang Disabilitas Desa Tanjung Agung Tahun 2025, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, diolah oleh penulis, 2026.



L

A

M

P

I

R

A

N



A. Dokumentasi Wawancara dengan Sekretaris Desa selaku Perwakilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanjung Agung



Gambar 1. Wawancara dengan Sekretaris Desa selaku Perwakilan Kepala Desa Tanjung Agung terkait pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara.

B. Dokumentasi Wawancara dengan Orang Tua selaku Perwakilan Anak Penyandang Disabilitas Desa Tanjung Agung



Gambar 2. Wawancara dengan orang tua selaku perwakilan anak penyandang disabilitas terkait pemenuhan hak kesehatan dan akses terhadap pelayanan serta bantuan kesehatan yang diterima di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara.

C. Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Desa Tanjung Agung



Gambar 3. Wawancara dengan masyarakat Desa Tanjung Agung terkait pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas serta dukungan masyarakat terhadap akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara.